



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Juni 2019/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : LEGISLATIF  
**LEMBAGA** : KPU (CALON ANGGOTA DPRD)  
**UNIT KERJA** : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)  
**SUB UNIT KERJA** : KABUPATEN MUARO JAMBI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **USMAN HALIK**
2. Jabatan : **CALON ANGGOTA DPRD**
3. NHK : **549000**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.730.000.000**

1. Tanah Seluas 25.550 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, Rp. 40.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 733 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 19.994 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
8. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
9. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
10. Tanah Seluas 8.025 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 140.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA/B401RA GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T)



MINIBUS/MP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

2. MOTOR, YAMAHA/BU9 SPD.MOTOR R2 Tahun 2018, HASIL  
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 256.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.126.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.126.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.